

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN DESERTASI.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR DIAGRAM.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Fungsi Obat dalam Kesehatan Masyarakat.....	1
1.1.1.1 Obat sebagai Produk Kekayaan Intelektual.....	3
1.1.1.2 Kondisi Industri Farmasi di Indonesia.....	10
1.1.1.2.1 Sejarah Industri Farmasi Indonesia.....	10
1.1.1.2.2 Profil Industri Farmasi di Indonesia.....	11
1.1.1.2.2.1 Industri Farmasi Asing.....	18
1.1.1.2.2.2 Industri Farmasi Nasional.....	22

1.1.2 Menyoal Produk Farmasi Palsu dalam Arus Perdagangan.....	25
1.1.3 Batasan Obat Palsu.....	32
1.1.4 Produksi dan Peredaran Obat Palsu di Indonesia.....	37
1.1.5 Dampak Pemalsuan Obat pada Perusahaan Obat.....	40
1.1.6 Pemalsuan Obat dan Kejahatan Kemanusiaan.....	44
1.2 Rumusan Masalah.....	46
1.3 Tujuan Penelitian.....	47
1.4 Manfaat Penelitian.....	48
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	48
1.4.2 Manfaat Praktik.....	48
1.5 Keaslian Penelitian.....	49
1.6 Sistematika Penulisan.....	50
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	53
2.1 Landasan Teori.....	53
2.1.1 Hukum sebagai Kaidah (Norma).....	53
2.1.1.1 Pengertian Hukum.....	55
2.1.1.2 Fungsi Hukum.....	58
2.1.1.3 Tujuan Hukum.....	61
2.1.1.4 Hakikat Norma.....	64
2.1.1.5 Kedudukan Hukum dalam Masyarakat.....	68
2.1.1.6 Penerapan Norma Hukum dalam Masyarakat.....	72
2.1.2 Hukum sebagai Pranata Sosial.....	76

2.1.2.1	Teori “ <i>Why People Obey the Law?</i> ”	79
2.1.2.2	Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedman.....	82
2.1.2.2.1	Sekilas tentang Teori Sistem.....	82
2.1.2.2.2	Teori Sistem Hukum.....	84
2.1.2.2.3	Teori Perlindungan Hukum.....	87
2.1.2.3	Teori Hukum sebagai Mekanisme Integrasi.....	91
2.1.2.3.1	Teori Sistem Sosial Talcott Parsons.....	91
2.1.2.3.2	Hukum sebagai Subsistem.....	94
2.1.2.4	Teori Hukum Responsif.....	95
2.1.2.5	Teori Negara Kesejahteraan.....	99
2.2	Perspektif Hukum atas Obat Palsu.....	100
2.2.1	Perspektif Hukum Pidana.....	101
2.2.2	Perspektif Hukum Perdata.....	102
2.2.3	Perspektif HKI.....	104
2.2.3.1	Paten.....	105
2.2.3.2	Merek.....	107
2.2.3.3	Rahasia Dagang (<i>Trade Secrets</i>).....	108
2.2.4	Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.....	109
2.2.5	Perspektif Hukum Kesehatan.....	111
2.2.6	Perspektif Hukum HAM.....	112
2.2.6.1	Konsepsi HAM.....	112
2.2.6.2	Perspektif Hukum atas HAM.....	113
2.2.6.3	Konsep Hak Asasi Manusia dan Kesehatan.....	114

2.2.6.4 Kejahatan Berat dan Kejahatan Kemanusiaan.....	116
2.2.6.4.1 Kejahatan Genosida.....	118
2.2.6.4.2 Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	122
2.3 Landasan Konseptual.....	127
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	135
3.1 Jenis Penelitian.....	135
3.2 Objek Penelitian.....	138
3.3 Data yang Digunakan.....	140
3.4 Pendekatan yang Digunakan.....	146
3.5 Analisis Data.....	150
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	151
3.6.1 Hambatan.....	151
3.6.2 Penanggulangan.....	151
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS.....	153
4.1 Perspektif Norma Tindakan dan Aspek Kebendaan Obat Palsu.....	153
4.1.1 Dua Aspek Utama.....	154
4.1.2 Pemalsuan dan Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Aspek Tindakan.....	155
4.1.2.1 Tindakan Sosial.....	156
4.1.2.2 Tindakan Ekonomi.....	158
4.1.2.3 Tindakan Kejahatan.....	163
4.1.3 Aspek Kebendaan Obat Palsu.....	169
4.1.3.1 Obat Palsu dan Ragam “Obat” di Masyarakat.....	171

4.1.3.1.1	Obat Palsu dan Narkotika.....	171
4.1.3.1.2	Obat Palsu dan Bahan Tambahan Pangan.....	173
4.1.3.1.3	Obat Palsu dan Psikotropika.....	174
4.1.3.1.4	Obat Palsu dan Kosmetika.....	176
4.1.3.1.5	Obat Palsu dan Obat Ilegal.....	177
4.1.4	Obat Palsu dalam Sistem Hukum Indonesia.....	178
4.1.4.1	Perlindungan Berdasarkan KUHP.....	178
4.1.4.1.1	Hukum Tindak Pidana Khusus	189
4.1.4.2	Perlindungan Berdasarkan KUH Perdata.....	190
4.1.4.3	Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.....	195
4.1.4.3.1	Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	202
4.1.4.3.2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Etika Kesehatan, dan Hak Asasi Manusia.....	207
4.1.4.3.3	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kesehatan.....	213
4.1.4.4	Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	214
4.1.4.4.1	Keberadaan Aspek Posisi.....	214
4.1.4.4.1.1	Kedudukan Konsumen dalam	

Undang-Undang Nomor 8	
Tahun 1999 tentang	
Perlindungan Konsumen.....	218
4.1.4.4.1.2 Kedudukan Pelaku Usaha dalam	
Undang-Undang Nomor 8	
Tahun 1999 tentang	
Perlindungan Konsumen.....	222
4.1.4.4.2 Norma-Norma Perlindungan Konsumen...	226
4.1.4.4.3 Pengaturan Perlindungan Hukum	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun	
1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	232
4.1.4.5 Perlindungan Berdasarkan HKI.....	237
4.1.4.5.1 Inti Perlindungan: Hak Kepemilikan.....	240
4.1.4.5.2 Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang	
Merek.....	247
4.1.4.5.2.1 Konsep Pemalsuan dalam	
Undang-Undang Nomor	
20 Tahun 2016 tentang	
Merek dan Indikasi	
Geografis.....	251
4.1.4.5.3 Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang	
Paten.....	254
4.1.4.5.3.1 Antara Obat, Paten, dan	

Pemalsuan.....	258
4.1.4.5.4 Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.....	260
4.1.4.5.4.1 Antara Rahasia Dagang, Paten, dan Merek.....	263
4.1.4.5.4.2 Rahasia Dagang dan Obat Palsu.....	266
4.1.4.6 Perlindungan dari Aspek Pengamanan Sediaan Farmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.....	268
4.2 Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Produksi dan Peredaran Obat Palsu di Indonesia.....	273
4.2.1 Hukum dalam Ranah Kenyataan.....	273
4.2.2 Ragam Pelaksanaan Hukum.....	275
4.2.2.1 Lebih Lanjut tentang Penegakan Hukum.....	276
4.2.2.2 Antara Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.....	278
4.2.3 Penegakan Hukum dalam Kasus Pemalsuan dan Peredaran Obat Palsu.....	281
4.2.3.1 Kepedulian Perusahaan Obat Pemegang Merek terhadap Penegakan Hukum Terkait Obat Palsu.....	293
4.2.3.1.1 Perusahaan Obat Pemegang Merek sebagai Korban.....	297

4.2.3.1.2 Pelaporan Perusahaan Obat Pemegang Merek.....	303
4.2.3.2 Peran BPOM dalam Penegakan Hukum pada Kejahatan Terkait Obat Palsu.....	305
4.2.4 Beberapa Putusan Pengadilan Mengenai Obat Palsu.....	319
4.2.4.1 Putusan Kasus Vaksin Palsu 2016.....	326
4.2.4.1.1 Duduk Perkara.....	327
4.2.4.1.1.1 Putusan Nomor 1496/Pid.Sus/2016/PN.Bks...329	
4.2.4.1.1.2 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2016/PN.Bks...331	
4.2.4.1.1.3 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN.Bks...333	
4.2.4.1.1.4 Putusan Nomor 1501/Pid.Sus/2016/PN.Bks...335	
4.2.4.1.1.5 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2016/PN.Bks....337	
4.2.4.1.1.6 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks....340	
4.2.4.1.1.7 Putusan Nomor 1512/Pid.Sus/2016/PN.Bks....346	
4.2.4.1.2 Pasal yang Digunakan.....	348
4.2.4.1.3 Hukuman yang Dijatuhkan.....	349

4.2.4.1.4	Analisis.....	351
4.2.4.1.5	Karakteristik Khusus dalam Kasus Vaksin Palsu.....	368
4.2.5	Budaya Masyarakat.....	369
4.2.5.1	Latar Belakang Survei.....	369
4.2.5.2	Profil Responden Survei.....	370
4.2.5.3	Hasil Survei.....	372
4.2.5.3.1	Perilaku Masyarakat di dalam Membeli Obat dengan Resep.....	372
4.2.5.3.2	Pandangan Masyarakat terhadap Obat Palsu.....	375
4.2.5.3.3	Perilaku Masyarakat dalam Melaporkan Kecurigaan Terkait Obat Palsu.....	377
4.2.5.3.4	Pandangan Masyarakat Terkait Pemberian Penegakan Hukum Kasus Pemalsuan Obat.....	380
4.3	Konsep Pengaturan Ideal untuk Menghadapi Fenomena Obat Palsu di Indonesia.....	383
4.3.1	Persoalan Terkait Pemantauan dan Pengawasan Obat Palsu di Indonesia.....	383
4.3.1.1	Implementasi CDOB yang Tidak Optimal.....	385
4.3.1.2	Implementasi SPK yang Tidak Optimal.....	393

4.3.1.2.1	Cermin Penerapan SPK di Rumah Sakit dalam Kasus Vaksin Palsu 2016.....	394
4.3.1.2.2	SPK di Apotek: Apa yang Dilanggar?.....	399
4.3.1.2.2.1	Menyoal Apotek Rakyat.....	402
4.3.1.2.2.2	Pelajaran dari Apotek Rakyat.....	406
4.3.1.2.3	Bagaimana dengan SPK Terkait Bidan?....	409
4.3.1.2.4	SPK Klinik: Suatu Kekosongan Hukum?.....	415
4.3.1.3	Implementasi CPOB yang Tidak Optimal.....	419
4.3.1.4	Perkembangan di Masyarakat.....	422
4.3.1.4.1	Obat Palsu dan <i>E-Commerce</i>	424
4.3.1.4.2	Permasalahan dalam Jual dan Beli Obat Daring.....	428
4.3.2	Kompleksitas Kejahatan Obat Palsu di Indonesia.....	429
4.3.2.1	Kejahatan Obat Palsu sebagai Kejahatan Transnasional.....	429
4.3.2.2	Kejahatan Obat Palsu sebagai Tindak Pidana Korporasi.....	442
4.3.3	Merancang Pemikiran untuk Merumuskan Pengaturan yang Ideal.....	449
4.3.3.1	Analisa terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	451

4.3.3.1.1	Ketidakmampuan Hukum Pidana dan HKI untuk Mengatasi Kejahatan Obat Palsu.....	453
4.3.3.1.2	Kelemahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	456
4.3.3.1.3	Dampak Obat Palsu.....	460
4.3.3.1.4	Kejahatan Obat Palsu sebagai Kejahatan Kemanusiaan.....	463
4.3.3.1.5	Kejahatan Obat Palsu dalam Kerangka Hukum Nasional.....	473
4.3.3.2	Urgensi Penormaan Kejahatan Obat Palsu sebagai Kejahatan Kemanusiaan.....	478
4.3.3.3	Solusi Sistematik Penyelesaian Obat Palsu.....	480
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	483
5.1	Kesimpulan.....	483
5.1.1	Pengaturan Perlindungan bagi Perusahaan Obat Pemegang Merek terhadap Ancaman Produksi dan Peredaran Obat Palsu.....	483
5.1.2	Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Produksi dan Peredaran Obat Palsu di Indonesia.....	489
5.1.3	Konsep Pengaturan Ideal untuk Menghadapi Kejahatan Pemalsuan Obat dan Peredaran Obat Palsu di Indonesia.....	493
5.2	Saran dan Rekomendasi.....	494

DAFTAR PUSTAKA	499
-----------------------------	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Mekanisme Perbedaan Harga Produk Farmasi Asli dan Farmasi Palsu.....	162
Grafik 4.2 Perkembangan Temuan dalam Operasi Pangea dari Tahun 2011—2017 yang Termonetisasi.....	318
Grafik 4.3 Perkembangan Temuan Jenis Obat Palsu dan Ilegal dalam Operasi Pangea dari Tahun 2011—2017.....	319
Grafik 4.4 Perkembangan Jumlah Kasus <i>Pro Justitia</i> pada Komoditas Obat dari Tahun 2011—2015.....	325

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Konsumsi Obat Per Kapita di Negara ASEAN 2004 (US\$).....	12
Diagram 1.2 Kategori Obat Palsu.....	37
Diagram 4.1 Persentase Pasal yang Dilanggar dalam Kasus Obat Palsu pada Tahun 2016.....	286
Diagram 4.2 Persentase Rata-Rata Vonis Pengadilan dalam Kasus Obat Palsu Tahun 2016.....	290

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Aktiva Lancar dan Laba Bersih Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013.....	19
Tabel 1.2 Data Penjualan Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013.....	20
Tabel 1.3 Total Pasar Farmasi Nasional Tahun 2014—2016.....	22
Tabel 1.4 Data Keuangan PT Samco Farma Periode 2008—2013.....	24
Tabel 1.5 Persentase Produk Palsu.....	30
Tabel 1.6 Pihak yang Dirugikan Akibat Beredarnya Farmasi Palsu.....	40
Tabel 1.7 Estimasi Persentase dari Barang Palsu dan Nilai Total Penjualan di UEA pada Tahun 2008.....	42
Tabel 2.1 Tiga Tipe Hukum.....	97
Tabel 4.1 Pihak yang Diuntungkan Akibat Beredarnya Produk Farmasi Palsu.....	160
Tabel 4.2 Alasan Konsumen Membeli Produk Farmasi Palsu.....	160
Tabel 4.3 Pertimbangan Konsumen Membeli Produk Farmasi.....	161
Tabel 4.4 Pertimbangan Menjual Produk Farmasi.....	161
Tabel 4.5 Matriks Putusan Kasus Obat Palsu.....	282
Tabel 4.6 Rincian Pasal yang Digunakan dalam Penegakan Hukum Terkait Perkara Obat Palsu Tahun 2016.....	286
Tabel 4.7 Perbandingan antara Vonis yang Dijatuhkan Berdasarkan Jumlah Perkara Obat Palsu pada Tahun 2016.....	289

Tabel 4.8. Rincian Ragam Vonis dalam Perkara Obat Palsu dengan Durasi Lebih dari 1 Tahun pada 2016.....	290
Tabel 4.9 Rincian Ragam Vonis dalam Perkara Obat Palsu dengan Durasi Kurang dari 1 Tahun 2016.....	290
Tabel 4.10 Statistik Operasi Pangea dari Tahun 2011—2017.....	316
Tabel 4.11 Daftar Temuan Jumlah Jenis Obat Palsu dan Ilegal dalam Operasi Pangea dari Tahun 2011—2017.....	318
Tabel 4.12 Kisaran Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan Tahun 2011.....	321
Tabel 4.13 Kisaran Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan Tahun 2012.....	321
Tabel 4.14 Perbandingan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan antara Tahun 2008—2013.....	322
Tabel 4.15 Kisaran Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan Tahun 2014.....	322
Tabel 4.16 Kisaran Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015.....	323
Tabel 4.17 Total Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan dari Tahun 2011—2015.....	323
Tabel 4.18 Rincian Pelanggaran Berdasarkan Jenis Komoditas dari Tahun 2011—2015.....	324
Tabel 4.19 Daftar Putusan Terkait Kasus Vaksin Palsu 2016.....	327
Tabel 4.20 Daftar Pemasok Vaksin Palsu CV Azka Medical.....	328

Tabel 4.21 Daftar Vaksin Palsu dan Pemasoknya.....	329
Tabel 4.22 Daftar Vaksin Palsu yang Dibeli oleh Apotek Rakyat Cahaya Medika.....	330
Tabel 4.23 Rincian Harga Jual Vaksin Palsu Apotek Rakyat Cahaya Medika.....	330
Tabel 4.24 Harga Jual Vaksin Palsu ke Rumah Sakit Harapan Bunda.....	331
Tabel 4.25 Rincian Harga Set Vaksin Bekas dari RS Betesda di Yogyakarta....	332
Tabel 4.26 Rincian Cara Pembuatan Vaksin Palsu yang Diproduksi oleh Nuraini.....	332
Tabel 4.27 Perbandingan antara Harga Modal dan Harga Jual Vaksin Palsu.....	333
Tabel 4.28 Daftar Vaksin yang Dijual oleh Mirza.....	336
Tabel 4.29 Jumlah Pembelian Vaksin Palsu Seno bin Senen.....	338
Tabel 4.30 Harga Jual Vaksin Palsu Seno bin Senen.....	339
Tabel 4.31 Daftar Keuntungan Hasil Penjualan Vaksin Palsu.....	340
Tabel 4.32 Daftar Vaksin Palsu, Bahan, dan Cara Pembuatan.....	340
Tabel 4.33 Daftar <i>Supplier</i> Botol Vaksin Bekas.....	343
Tabel 4.34 Harga Botol Vaksin Bekas Per Set Berdasarkan Pemasok.....	344
Tabel 4.35 Rincian Harga Bahan Vaksin Palsu.....	344
Tabel 4.36 Daftar Pembeli Vaksin Palsu dan Harga Jual.....	344
Tabel 4.37 Daftar Pemasok Vaksin Apotek Rakyat Ibnu Sina.....	347
Tabel 4.38 Pasal Dakwaan terhadap Para Pelaku Berdasarkan 7 Putusan.....	348
Tabel 4.39 Perbandingan antara Vonis Pengadilan dengan Tuntutan JPU dalam Kasus Vaksin Palsu 2016.....	349

Tabel 4.40 Harga Vaksin yang Tidak Menyebabkan Demam dalam Kasus Manogu Elly Novita.....	352
Tabel 4.41 Fungsi dari Vaksin Asli.....	353
Tabel 4.42 Jumlah Anak Penerima Vaksin Palsu Per Provinsi.....	354
Tabel 4.43 Produsen Asli dari Vaksin yang Dipalsukan dalam Kasus Vaksin Palsu 2016.....	362
Tabel 4.44 Pengungkapan Pelaku Vaksin Palsu.....	369
Tabel 4.45 Profil Responden.....	371
Tabel 4.46 Faktor Terpenting dalam Membeli Obat.....	373
Tabel 4.47 Tempat Responden Menebus Resep Obat.....	373
Tabel 4.48 Perilaku Responden dengan Resep Dokter.....	374
Tabel 4.49 Alasan Responden Tidak Menggunakan Resep Dokter.....	374
Tabel 4.50 Pengetahuan Responden Mendapatkan Obat Palsu.....	375
Tabel 4.51 Pengetahuan Responden terhadap Kasus Vaksin Palsu 2016.....	375
Tabel 4.52 Pemangku Kepentingan yang Bertanggung Jawab Menurut Responden Terkait Kasus Vaksin Palsu.....	376
Tabel 4.53 Saluran Pelaporan yang Dipilih Responden.....	378
Tabel 4.54 Sumber Informasi Kesehatan Menurut Responden.....	379
Tabel 4.55 Motif Kejahatan Obat Palsu.....	380
Tabel 4.56 Program Edukasi dari Produsen Obat.....	381
Tabel 4.57 Jenis Program Edukasi dari Produsen Obat.....	381
Tabel 4.58 Penggolongan Jenis Kejahatan Obat Palsu Menurut Responden.....	382
Tabel 4.59 Ekspektasi Responden dalam Pemberian Hukum.....	383

Tabel 4.60 Temuan BPOM Terkait Pelaksanaan CCDOB Tahun 2017.....	388
Tabel 4.61 Daftar Rumah Sakit yang Menggunakan Vaksin Palsu dalam Kasus Vaksin Palsu 2016.....	396
Tabel 4.62 Daftar Praktik Mandiri Bidan dan Klinik yang Menggunakan Vaksin Palsu dalam Kasus Vaksin Palsu 2016.....	411
Tabel 4.63 Faktor Utama yang Menjadi Dasar Responden dalam Melakukan Pembelian Obat.....	441
Tabel 4.64 Komparasi Unsur-Unsur Genosida dengan Obat/Vaksin Palsu.....	467
Tabel 4.65 Komparasi Unsur-Unsur Kejahanan Kemanusiaan dengan Obat/Vaksin Palsu.....	468
Tabel 4.66 Data Malaria secara Global pada Tahun 2013.....	471
Tabel 4.67 Dampak Negatif Peredaran Obat Malaria Palsu (dan Obat Palsu Secara Umum).....	473
Tabel 4.68 Kekosongan Pengaturan Kejahanan Obat Palsu.....	468

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Realisasi Investasi Industri Farmasi.....	13
Gambar 1.2	Kondisi Indonesia.....	15
Gambar 1.3	Perbandingan Jumlah Industri Farmasi Berdasarkan Kepemilikan antara Periode 2014—2015 dengan Tahun 2016.....	21
Gambar 1.4	Total Jenis Obat Palsu yang Beredar di Indonesia dari Tahun 2012—2015.....	28
Gambar 4.1	Contoh Temuan Obat Palsu “ <i>Incidal OD</i> ”.....	297
Gambar 4.2	Contoh Temuan Obat Palsu “ <i>Imodium</i> ”.....	298
Gambar 4.3	Alur Peredaran Obat.....	299
Gambar 4.4	Jalur Distribusi Obat.....	300
Gambar 4.5	Rantai Distribusi Obat Palsu.....	384
Gambar 4.6	Posisi Masing-Masing Standar dalam Alur Peredaran Obat.....	394
Gambar 4.7	Contoh Situs yang Menjual Obat Palsu dan Ilegal (1).....	426
Gambar 4.8	Contoh Situs yang Menjual Obat Palsu dan Ilegal (2).....	427
Gambar 4.9	Kondisi Pasar yang Mendorong Beredarnya Obat Palsu di Masyarakat.....	440